



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BLITAR

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024



Jl. DR Moh.Hatta 05 Kota Blitar

telp/faks : 0342 - 807805

situs web : <http://diskominfotik.blitarkota.go.id>

e-mail : diskominfotik@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2024 dapat diselesaikan.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2024

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2024, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kota Blitar yang sejahtera dan lebih baik.

Blitar, Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Kota Blitar



MUJIANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720214 199201 1003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, tahun 2024 diarahkan pada tema: **“Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”**, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan.

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021– 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, dokumen perencanaan lingkup nasional dan regional, serta tindak lanjut dalam proses penyusunan KUPPAS dan RAPBD Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan periode sebelumnya serta mempertimbangkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini akan tersusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja juga dimaksudkan sebagai parameter dalam memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sekaligus sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); →

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun Nomor).
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakakn dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan KUA/PPAS Tahun 2024, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024 dan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Serta sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika;
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, serta penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK menguraikan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.
- BAB V PENUTUP, berisikan catatan penting dengan menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik tahun 2023;



BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2023 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dapat diketahui dari pengukuran kinerja dan pengukuran keuangan pada tahun sebelumnya. Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar tahun lalu (tahun 202) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) dengan mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas Komuninkasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar s/d Tahun 2024 Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/s ub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023						Target program , kegiatan , dan sub kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023					
						Target Renja PD tahun 2022		Realisasi Renja PD 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	3	4			5		6		7		8		9		10=(5+7 +9)		11=(10/4)	
		K	Satuan	R p	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp
Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar																		



Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika																		
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	100	persen	11.583.758.603			83	2.564.813.096	83	1941345572	100	71,50 94	85	2.693.053.751	85	4.634.399.323	85%	40%
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100	persen				60						70		70	0	70%	#DIV/ 0!
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	89	Persen	11.583.758.603			34%	2.564.813.096	60	2700482670	100	99,47 21	45, 5	2.693.053.751	45,5	5.393.536.421	51%	47%

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	dokumen	126.441.159									2	29.335.845	2	29.335.845	100%	23%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi publik	4	dokumen	73.633.230									4	17.220.910	4	17.220.910	100%	23%
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	dokumen	28.271.619									12	6.559.350	12	6.559.350	100%	23%

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	530	dokumen	786.347.379									510	182.822.325	510	182.822.325	96%	23%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5	Orang	58.517.088									30	14.100.522	30	14.100.522	600%	24%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11	dokumen	3.603.121.598									11	835.966.845	11	#	100%	23%
																0	#DIV/0!	#DIV/0!



Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	dokumen	2.722.292.557									5	639.786.735	5	639.786.735	42%	24%
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1300	layanan	3.474.761.554									1000	806.185.796	1000	806.185.796	77%	23%
Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	dokumen	584.291.587									1	137.153.625	1	137.153.625	100%	23%



Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1	dokum en	52.924.090									1	12.279.015	1	12.279.015	100%	23%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	40	orang	25.507.816									30	5.918.115	30	5.918.115	75%	23%



Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan	80	dokumen	82.921.332									80	19.238.730	80	19.238.730	100%	23%
--	---	----	---------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	------------	----	------------	------	-----

Program Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	100	Persen	34.396.659.909			86,35						90	8.058.813.219	90	8.058.813.219	90%	23%
------------------------------	---	-----	--------	----------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	----	---------------	----	---------------	-----	-----

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100	Persen	27.330.598.438			100%	6.033.779.702	100	6574191793	100	108,9 57	100	6.337.534.067	100	12.911.725.860	100%	47%
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	6	domain	87.153.788								6	21.300.000	6	21.300.000	100%	24%	



Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	279.979.429									1	60.438.360	1	60.438.360	50%	22%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	20	unit	26.778.275.436									3	6.285.795.707	3	6.285.795.707	15%	23%



Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	100	Persen	7.066.061.471			90,50 %	1.180.132.246	100	1332355599		95,44 53	93	1.721.279.152	93	3.053.634.751	93%	43%
--	--	-----	--------	---------------	--	--	---------	---------------	-----	------------	--	----------	----	---------------	----	---------------	-----	-----



Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	308.605.384									1	72.096.635	1	72.096.635	100%	23%
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	dokumen	162.547.827									1	77.041.200	1	77.041.200	100%	47%



Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	unit	499.415.000									1	181.210.000	1	181.210.000	100%	36%
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	dokumen	3.224.000.000									1	748.000.000	1	748.000.000	100%	23%
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	3	dokumen	675.063.600									2	270.063.600	2	270.063.600	67%	40%



Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1	perangkat daerah	481.202.500									1	70.000.000	1	70.000.000	100%	15%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2	unit	2.640.055.280									2	682.860.684	2	682.860.684	100%	26%

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2	layanan	202.000.000									1	12.000.000	1	12.000.000	50%	6%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2	Dokumen	998901375									1	22.500.000	1	22.500.000	50%	2%



Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	dokumen	1.090.488.872									1	269.739.740	1	269.739.740	100%	25%
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	dokumen	7.117.062									1	1.717.062	1	1.717.062	100%	24%

Urusan Pemerintah Bidang Statistik																0	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!
Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	100	Persen	2.195.679.074			93,43	427.353.510	100	60024410	107,0 32	14,04 56	95, 07	505.201.636	95,0 7	565.226.046	95%	26%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100	Persen	1.850.000.000			100	350.971.000	100	331998010	100	77,68 7	100	425.000.000	100	756.998.010	100%	41%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	dokumen	1.850.000.000									5	425.000.000	5	425.000.000	167%	23%
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10	orang	84320249									10	19.563.296	10	19.563.296	100%	23%



Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4	dokumen	113140781									8	26.250.000	8	26.250.000	200%	23%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	4	orang	14907276									8	3.452.400	8	3.452.400	200%	23%
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1	unit	113.230.781									1	26.250.000	1	26.250.000	100%	23%

Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	dokumen	20.196.987									1	4.685.940	1	4.685.940	100%	23%
Urusan Pemerintah Bidang Persandian																0	#DIV/0!	#DIV/0!
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69,77	persen	1.621.604.186			38,76	358.315.580	59,2966	386725576	152,984	107,929	46,51	376.231.359	46,51	762.956.935	67%	47%



Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	60,77	Persen	1041888745				38,76	230.219.540	14,7892	230688150	38,1558	100,204	46,51	241.730.517	46,51	472.418.667	77%	45%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	dokumen	560.153.853										1	129.962.322	1	129.962.322	100%	23%



Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	laporan	232.811.234									6	54.014.961	6	54.014.961	150%	23%
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2	laporan	161.937.676									3	37.571.457	3	37.571.457	150%	23%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3	perangkat daerah	86.985.982									20	20.181.777	20	20.181.777	667%	23%

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	100	Persen	579.715.441									35	134.500.842	35	134.500.842	35%	23%
Operasionalisasi Jaringan komunikasi sandi Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	40		572.301.082									20	134.500.842	20	134.500.842	50%	24%
Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika		Baik (79-84)	Indeks	23.134.374.247,01												0	#VALUE!	0%



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Persen	188.575.361			84	84,09	5126322719	100,1 07	79,00 78	100	43.751.715	100	5.170.074.434	100%	2742 %
Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100	Persen	188.575.361			100	41668300	34695000	100	67,14 95	11	17.501.715	11	52.196.715	11%	28%



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	75434580			11	16.668.300	11	2335000	100	14,0086	7	26.250.000	7	28.585.000	64%	38%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	laporan	113.140.781									1	10.500.000	1	10.500.000	14%	9%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	34.600.000									100	4.344.021.045	100	4.344.021.045	10000 %	12555 %

Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	Persen	18.723.273.706				100	4.137.162.900	100		100	98,56 69	13	4.335.936.150	13	7.979.063.684	13%	43%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	laporan	18.688.426.799							3643127534			4	8.084.895	4	8.084.895	31%	0%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	4	laporan	34.846.909									100	1.347.521.805	100	1.347.521.805	2500%	3867 %
---	---	---	---------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---------------	-----	---------------	-------	-----------

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	Persen	5.807.987.420			100	1.283.354.100	100	93978000	100	98,60 87	68	26.569.300	68	120.547.300	68%	2%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51	paket	114.516.673			51	25.304.000	68	25296000	100	99,96 84	50	1.320.952.605	50	1.346.248.605	98%	1176 %
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100	orang	5.693.470.846									100	393.682.510	100	393.682.510	100%	7%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	Persen	1.696.820.829			100	374.935.724	100	558014289,2	100	99,70 14	4	17.839.500	4	575.853.789	4%	34%
Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	76.890.475									3	11.000.000	3	11.000.000	75%	14%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	44.000.000									5	33.966.790	5	33.966.790	167%	77%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19	paket	146.401.112									36	83.391.220	36	83.391.220	189%	57%
Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	362.837.957									1	14.542.500	1	14.542.500	3%	4%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	62.679.993									24	10.237.500	24	10.237.500	400%	16%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	44.124.905									36	222.705.000	36	222.705.000	1200%	505%

Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	laporan	959.886.389									100	429.040.500	100	429.040.500	270%	45%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100	Persen	1.849.218.185			100	408.610.000	100	344488523	100	84,30 74	36	429.040.500	36	773.529.023	36%	42%
Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	1.849.218.185									13	232.050.000	13	232.050.000	36%	13%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	982.050.000									100	355.911.780	100	355.911.780	769%	36%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100	Persen	1.534.024.260			100	338.963.600	100	406909722	100	120,0 45	8	127.682.940	8	534.592.662	8%	35%



Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	550.329.431			8	121602800	8	126092700	100	215,139	8	8	126.092.700	100%	23%	
Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	unit	154.234.700									8	34.234.700	8	34.234.700	89%	22%
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	310.000.000									1	70.000.000	1	70.000.000	11%	45%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	238.985.226									2	70.192.500	2	70.192.500	200%	23%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	3.433.750.000			100	150.000.000	100	149452400	100	99,63 49	100	1.125.000.000	100	1.274.452.400	5000%	533%



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	unit	1.708.750.000										0	1.125.000.001	0	1.125.000.001	0%	33%
--	--	---	------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	---	---------------	----	-----

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Diskominfo Tahun 2022 Kota Blitar, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
 - b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
 - c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 6 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

- e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Adanya Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 1 kegiatan pada Program Program Informasi dan Komunikasi Publik semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Program Informasi dan Komunikasi Publik telah mencapai 100%.

- e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut :

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Program Informasi dan Komunikasi Publik, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.

3. Program Aplikasi Informatika

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
- d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
- Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar.
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah
- Dari 2 kegiatan pada Program Aplikasi Informatika semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Aplikasi Informatika telah mencapai 100%.
- e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
- Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan Program Aplikasi Informatika, ke depan dilakukan perbaikan pelaksanaan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
- Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Data statistik sektoral dapat dikumpulkan sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai bank data Kota Blitar .
 - Meningkatnya koordinasi pro aktif dengan OPD terkait di OPD yang belum mengumpulkan data statistik sektoral
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 1 kegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar harus tetap dijaga dan terus ditingkatkan kinerjanya dengan program-program yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Harapannya dengan kinerja yang lebih baik dan program-program yang lebih tepat sasaran, Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar dapat naik lebih signifikan dan dapat mencapai target RPJMD tahun 2021-2026. Beberapa program atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar adalah dengan sinkronisasi dan koordinasi dengan aplikasi SIPD terkait penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Penyelenggaraan bimbingan teknis penilaian mandiri keamanan informasi perangkat daerah menggunakan indeks KAMI.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 2 kegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1

bahwa indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, ke depan dilakukan Beberapa program atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar adalah dengan melakukan bimbingan teknis, desk atau pendampingan terkait peningkatan nilai capaian Indeks Kami.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator -indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Penngukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar menangani urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Terkait hal tersebut Dinas Kominfoitik berkewajiban memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai IKU PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Gambaran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pencapaian target pelayanan PD tahun 2022 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (sesuai Renstra 2021 – 2026)

NO	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	INDIKATOR TUJUAN											
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik			2,31	2,63	2,95	3,20	2.81	-	2,95	3,20	
II	INDIKATOR SASARAN											
A.	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
	Persentase layanan publik online dan terintegrasi			89	94	98	100	90	94	98	100	
	Nilai Hasil Monev PPID			81	86	91	96	76	86	91	96	



b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
	Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Presentase layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi			89	94	98	100	90	94	98	100	100	
	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar			34	45,5	57	68,5						

B.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)												
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan			96	97	98	99	100	97	98	99		
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100		

	Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
	Indeks KAMI			38,76	46,51	54,26	62,02	39,4	46,51	54,26	62,02	
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
	Tingkat keamanan informasi pemerintah			38,76	46,51	54,26	62,02	39,4	46,51	54,26	62,02	

III	INDIKATOR PROGRAM											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik (79-84)	Baik (79-84)	Baik (79-84)	Baik (79-84)	Baik 84,09	10	Baik (79-84)	Baik 84,09	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik											
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan			83	85	90	95	83	50	90	95	
	Persentase komunitas masyarakat/mitra			60	70	80	90	60	11,6	80	90	

	strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah												
3	Program Aplikasi Informatika												
	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik			86,35	90	92,89	95	100		92,89	95		
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik			93,43	95,07	96,71	98,35	100	100	96,71	98,35		
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi												

	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			38,76	46,51	64,26	62,02	59,3	26,6	64,26	62,02		

Berdasarkan table 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama Persentase layanan publik online dan terintegrasi merupakan periode pertama penghitungan di awal Renstra tahun 2021-2026. Dengan Target di Tahun 2022 sebesar 89 % dan terealisasi sebesar 90 % dengan persentase sebesar 101,1 %, kriteria sangat baik
2. Indikator Kinerja Utama Nilai hasil PPID dengan target 81 % pada tahun ini terealisasi 76 % persentase sebesar 93,8 % baik.ada beberapa Faktor penyebab tidak tercapainya target diantara :- Daftar informasi publik yang tidak di update secara berkala , terjadinya turnover SDM yang cepat serta adanya Adanya aturan terbaru (Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021) sehingga perlu penyesuaian SK, Pedoman SOP serta standart norma yang berlaku di PPID Kota Blitar dan PPID Pelaksana.
3. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo dengan target 100 % dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik , hal ini menunjukkan bahwa internet di seluruh Perangkat Daerah sudah dapat diakses guna mendukung giat atau operasional pada bidang IT. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu adanya koordinasi dan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Kunci Presentase layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 89 % dan terealisasi 90 % dengan kriteria sangat baik , hal ini menunjukkan bahwa internet di seluruh Perangkat Daerah sudah dapat diakses guna mendukung giat atau operasional pada bidang IT. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar.
4. Indikator Kinerja Kunci Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar dengan target 34 % dan terealisasi 87 % dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media social sehingga diseminasi informasi kepada Masyarakat mudah terserap.

5. Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan dengan target 96 % pada tahun ini terealisasi 100 % persentase sebesar 104.16 %. Dikarenakan Data Statistik Sektoral sudah terkumpul sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai Bank Data Kota Blitar.
6. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik. Menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mempublikasikan data statistik sektoral
7. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik. Menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mempublikasikan data statistik sektoral
8. Indikator Kinerja Utama Indeks KAMI dengan target 38.76% dan terealisasi 39.4 % dengan kriteria sangat baik.
9. Indikator Kinerja Kunci Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan target 38.76% dan terealisasi 39.4 % dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang penilaian mandiri keamanan informasi menggunakan Indeks KAMI

2.3 Isu- Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik, urusan

bidang persandian yang harus diselesaikan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sebagai berikut:

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :

- Perlunya peningkatan pengembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintahan yang sepenuhnya terdigital untuk mewujudkan smart city di Kota Blitar .
- Perlunya peningkatan pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;
- Perlunya peningkatan pengembangan pemanfaatan layanan Data center untuk meningkatkan keamanan dan integrasi data serta interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar;
- Perlunya peningkatan pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
- Belum optimalnya pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ;
- Belum optimalnya pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

2. Urusan Bidang Statistik

Belum optimalnya peningkatan pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;

3. Urusan Bidang Persandian

Perlunya peningkatan pengembangan pelayanan persandian dan keamanan informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024



Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJM D, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Blitar	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	85	2.693.053.751	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Blitar	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	90%	2235944000	
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	70				Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	80%		

	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	45,5	2.693.053.751	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	57%	2.235.944.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	29.335.845	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	27.120.000,00	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	17.220.910	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	14.027.400,00	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	6.559.350	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	6.370.134,00	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	510	182.822.325	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	520 Dokumen	188.877.240,00	

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11	835.966.845	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	507.826.440,00	
	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	639.786.735	Layanan Hubungan Media		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1100 Layanan	513.616.760,00	
	Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media	1000	806.185.796	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Dokumen	616.930.026,00	
	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	137.153.625	Manajemen Komunikasi Krisis		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	275.361.400,00	
	Manajemen Komunikasi Krisis		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1	12.279.015	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	30 Orang	3.624.500,00	

	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30	5.918.115	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	80 Dokumen	38.761.800,00	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	80	19.238.730	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	80 Dokumen	43.428.300,00	
	Program Aplikasi Informatika		Persentase layanan publik online dan terintegritasi	94	8.058.813.219	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	92,89%	5700316310	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	90	6.337.534.067	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100%	4909160910	

	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100	21.300.000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Domain	4999995	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	6	60.438.360	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	29999880	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6.285.795.707	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	20 Unit	4874161035	
	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3	1.721.279.152	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	100%	791155400	

	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	93	72.096.635	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	42522400	
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	77.041.200	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	37269100	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	181.210.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	9338000	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	748.000.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	199997889	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	270.063.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	3 Dokumen	39253400	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2	70.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 Perangkat Daerah	12724400	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1	682.860.684	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	198250500	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2	12.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	33323400	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan	1	22.500.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	34931000	

			Pemerintah Daerah								
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	269.739.740	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	178967311	
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	1.717.062	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	4578000	
	Program penyelenggaraan statistik sektoral		Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	505.201.636	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	96,71%	340838700	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	95,07	425.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100%	340838700	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral		Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100	425.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	211845300	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5	19.563.296	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10 Orang	27837500	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10	26.250.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	26060000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	8	3.452.400	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	4 Orang	55987300	
	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	8	26.250.000	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	14887300	

	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah Infrastruktur Statistik	1	4.685.940	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	4221300	
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	376.231.359	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64,26%	256283000	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46,51	241.730.517	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	54,26%	165203000	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	46,51	129.962.322	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	75400000	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1	54.014.961	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	49608000	



			Kabupaten/Kota yang Ditetapkan								
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	37.571.457	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	24965000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3	20.181.777	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20 Perangkat Daerah	15230000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20	134.500.842	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	50%	91080000	

	Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	35	134.500.842	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 Perangkat Daerah	91080000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	20	5.629.451.538,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Indeks	5238213036	
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84)	43.751.715	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	20139150	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100	17.501.715	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5239150	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	26.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	10000000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	10.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4900000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4.344.021.045	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3994465046	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	4.335.936.150	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3987165046	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	8.084.895	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	7300000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4	1.347.521.805	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	116900800	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	26.569.300	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	24790400	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68	1.320.952.605	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	92110400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	393.682.510	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	296515100	

	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	17.839.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9700000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	11.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13012100	
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	33.966.790	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27000000	
	Penyediaan bahan Logistik kantor		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	83.391.220	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	51125000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	14.542.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5800000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.237.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4000000	
	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	222.705.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	185878000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.050.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100%	555389000	
	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	355.911.780	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	320000000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100	127.682.940	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	235389000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	34.234.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100%	254803940	

	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97303940	
	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	70.192.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	90000000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1.125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67500000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Perangkat Daerah sudah melakukan sinkronisasi rumusan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar di Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Hasil sinkronisasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024, sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Tabel. 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Blitar

N o.	Usulan	Program/kegiata n/sub kegiatan	Lokasi	Indikato r Kinerja	Besaran/Vol ume	Catatan
	1	2	3	4	5	6
1	Pembina an Kelompo k Informa si Masyara kat (KIM)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah m Kabupaten/ Kota	Kecamata n Kepanjenk idul	Persenta se masyara kat yang menjadi sasaran penyeba ran informas i publik	1 kali	Dikuti oleh 3 Kecama tan , masing - masing @ 50 Orang Total peserta 150 orang

Sumber : DSP (Daftar Skala Prioritas) Musrenbang Kecamatan untuk Diskominfo Kota Blitar Tahun 2024

Dari sisi program usulan tersebut diatas memang tidak masuk dalam anggaran rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja maupun rencana strategis dari Dinas Kominfo dan Statistik. namun demikian didalam proses penganggarannya akan dilihat dari dana usulan musrenbang/ aspirasi masyarakat yang dikelola oleh Bapedda.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan PD di Kabupaten / Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi yang berkaitan dengan pembangunan komunikasi, informatika dan statistik.

No.	Kebijakan Nasional/Propinsi	Sumber	Keterangan
	A. Nasional		
1.	a) Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik b) Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan c) Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital d) Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan e) Mempercepat penyelesaian legislasi primer f) Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah g) Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Renstra 2020-2024 Kementrian Komunikasi dan Informatika	Arah Kebijakan dan Strategis 2020-2024
2.	a) Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat,	Renstra Badan Pusat Statistik 2020-2024	Arah dan Kebijakan Strategi BPS

	pemerintah daerah, dan swasta. b) Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data c) Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM d) Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik e) Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia f) Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas		
3.	a) Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia b) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di BSSN melalui kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik.	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2020 - 2024	Arah dan Kebijakan Strategi BSSN
	B. Provinsi		
1.	a) Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur b) Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	Arah dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

	informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi c) Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah d) Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya e) Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur		
--	---	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar 2021-2026. Yang berdasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan Statistik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar sebagai berikut:

Table 3.2.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra 2022	Realisasi 2022	Target Kinerja Renstra 2023	Target Kinerja Renstra 2024
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,31	2,81	2,63	2,95

Berbasis Elektronik					
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28	84,82	85	86,25

Dengan indikator tujuan yang disusun adalah Indeks SPBE. Target Kinerja dari Indikator Tujuan yang ingin di capai tahun 2024 adalah sebesar 2,95

SASARAN

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Maka sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata Kelola TIK
2. Meningkatnya system keterbukaan informasi public
3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah
4. Meningkatnya keamanan informasi
5. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Tabel 3.2.2

Sasaran Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Blitar Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	89%	90 %	94%	98%
2	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	81	76	86	91

3	Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	96%	100 %	97%	98%
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	38,76	39.4	46,51	54,26
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah					

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan pada pencapaian program nasional, pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar, pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informasi, peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik dan pencapaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Program dan Kegiatan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2023 berdasarkan hasil pemetaan dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang direncanakan sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Keterangan
------	--	---	------------



1	2	3	4
216.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	Mendukung pencapaian IKK
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	
216.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	
216.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
216.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi publik	

216.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	
216.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
216.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
216.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	
216.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	
216.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	
216.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	

216.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	
216.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan	
216.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Mendukung pencapaian IKK
216.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	
216.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	

216.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
216.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
216.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	
216.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
216.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	
216.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	

216.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
216.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	
216.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	
216.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
216.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	

216.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	
216.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
216.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	
220.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	Mendukung pencapaian IKK
220.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	

220.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
220.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
220.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
220.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
220.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	
220.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	
221.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian IKK

221.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	
221.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	
221.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
221.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
221.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	
221.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	
221.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	
216.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian IKK
216.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	
216.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

216.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
216.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
216.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
216.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
216.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
216.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
216.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
216.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
216.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	

216.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
216.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
216.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
216.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
216.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
216.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
216.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
216.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	
216.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
216.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
216.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	
216.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

216.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
216.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, DAN STATISTIK KOTA BLITAR

1. Rencana Program Kerja Tahun 2024

Pada tahun anggaran tahun 2024 ini, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar menyesuaikan dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam perubahan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar 2021 – 2026.

Program yang disusun berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu. Ditetapkan untuk dipedomani, dijabarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahun anggaran 2024 ini direncanakan terdapat 2 program administrasi umum dengan 7 kegiatan, dan 4 program dengan 9 kegiatan. Total kebutuhan dana / pagu indikatif pada tahun 2024 adalah sebesar Rp13.771.595.046 . Adapun program / kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2024 diuraikan secara rinci pada Tabel 4.1 tentang Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				13.771.595.046,00				14.541.661.841,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.771.595.046,00				14.541.661.841,00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13.174.473.346,00				13.893.309.211,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84 INDEKS	5.238.213.036,00			-	5.483.138.640,00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		100 Persen	20.139.150,00			-	20.126.500,00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	5.239.150,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.316.500,00
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	7 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.665.000,00
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 Laporan	4.900.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.145.000,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 Persen	3.994.465.046,00			-	4.194.188.300,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	31 Orang/bulan	3.987.165.046,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM			4.186.523.300,00

2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	7.300.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.665.000,00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 Persen	116.900.800,00			-	116.746.340,00
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Paket	24.790.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			27.537.400,00
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 Orang	92.110.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			89.208.940,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 Persen	296.515.100,00			-	307.250.000,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	9.700.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.185.000,00
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	13.012.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			13.700.000,00
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	5 Paket	27.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			28.350.000,00
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Paket	51.125.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK			46.725.000,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.800.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.090.000,00

2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	24 Dokumen	4.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.200.000,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	36 Laporan	185.878.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			198.000.000,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart		100 PersenAngka	555.389.000,00			-	578.652.500,00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	36 Laporan	320.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			335.000.000,00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	13 Laporan	235.389.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			243.652.500,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart		100 Persen	254.803.940,00			-	266.175.000,00
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	8 Unit	97.303.940,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			100.800.000,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	90.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			94.500.000,00
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	67.500.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			70.875.000,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		90 Persen 80 Persen	2.235.944.000,00			-	2.377.434.505,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		57 Persen	2.235.944.000,00			-	2.377.434.505,00

2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	27.120.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		28.476.000,00
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	14.027.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		14.550.270,00
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6.370.134,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		6.688.641,00
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520 Dokumen	188.877.240,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		209.750.000,00
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	507.826.440,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		543.682.692,00
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	513.616.760,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		535.828.818,00
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1100 Layanan	616.930.026,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		656.935.774,00
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	275.361.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		290.070.000,00
2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.624.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		3.805.725,00

2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	38.761.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			40.000.000,00
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Dokumen	43.428.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			47.646.585,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik		92,89 Persen	5.700.316.310,00			-	6.032.736.066,00
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan		100 Persen	4.909.160.910,00			-	5.181.750.000,00
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	6 Domain	4.999.995,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.250.000,00
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	29.999.880,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			31.500.000,00
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	4.874.161.035,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			5.145.000.000,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik		96 Persen	791.155.400,00			-	850.986.066,00
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	42.522.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			45.300.000,00
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	37.269.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			42.000.000,00

2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	9.338.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		11.875.000,00
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	199.997.889,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		210.000.000,00
2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	39.253.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		42.750.000,00
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Perangkat Daerah	12.724.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		14.450.000,00
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	198.250.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		220.000.000,00
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Layanan	33.323.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		36.575.000,00
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	34.931.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		38.000.000,00
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	178.967.311,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		184.936.066,00
2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.578.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		5.100.000,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				340.838.700,00			371.433.340,00

2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik		96.71 persen	340.838.700,00			-	371.433.340,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		100 Persen	340.838.700,00			-	371.433.340,00
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	211.845.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			231.713.960,00
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	27.837.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.266.850,00
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	26.060.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			28.628.000,00
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	55.987.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			60.760.500,00
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	14.887.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.631.665,00
2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.221.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			4.432.365,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				256.283.000,00				276.919.290,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		64,26 persen	256.283.000,00			-	276.919.290,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota		54.26 Persen	165.203.000,00			-	175.559.290,00

2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	- Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 Dokumen	75.400.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			78.781.290,00
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	49.608.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			52.600.000,00
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	24.965.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			27.187.000,00
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Perangkat Daerah	15.230.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			16.991.000,00
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi		50 persen 50 persen	91.080.000,00			-	101.360.000,00
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Perangkat Daerah	91.080.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			101.360.000,00



Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022

pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Membuat program pelaksanaan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar	Akan disusun review masterplan SPBE yang disesuaikan antara perencanaan dengan implementasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Membuat program pendampingan penyusunan Review Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Telah dilaksanakannya asistensi kegiatan pendukung SPBE tahun 2023	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dlm Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota
3.	Membuat program pelaksanaan audit TIK pada tahun 2023	Akan dilakukan persiapan unt permohonan hak akses audit tools kepada BRIN, diantara dgn kegiatan : - penyusunan draft MoU pelaksanaan audit - mengajukan SK tim audit TIK internal	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi



		- sosialisasi penggunaan audit tools dari BRIN	
4.	Mengkoordinir PPID Pelaksana SKPD dan BUMD untuk menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang bersifat terbuka dan Informasi yang Dikecualikan, dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali untuk dilakukan update	Akan dilakukan proses pengumpulan DIP PPID Pelaksana	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
5.	Sosialisasi tentang peraturan layanan informasi publik Perki No. 1 tahun 2021 dan sudah direalisasikan di akhir tahun 2022	Sudah dilakukan sosialisasi Perki No 1 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Blitar No 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
6.	Penyusunan penyesuaian SK, Pedoman SOP serta standart norma yang berlaku di PPID Kota Blitar dan PPID Pelaksana akan direalisasikan di Tahun 2023	Sudah dilakukan penyusunan SK PPID Utama dan Pelaksana. Selanjutnya akan dibuatkan SOP terkait.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
7.	Adanya pejabat fungsional PPID selain itu Melakukan koordinasi, sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Pelaksana SKPD dan BUMD, ataupun melakukan kunjungan rutin ke OPD masing-masing, menunjuk atau	Sudah ada penunjukkan pejabat pengelola PPID sesuai dengan yang tertuang di SK PPID Utama dan Pelaksana	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

	mengangkat admin non pns yang bertugas melayani permohonan informasi (PPID) sehingga apabila ada perpindahan pegawai memiliki cadangan SDM		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
8.	Sinkronisasi dan koordinasi dengan aplikasi SIPD terkait penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar		
9.	Melakukan bimbingan teknis, desk atau pendampingan terkait peningkatan nilai capaian Indeks Kami	Melaksanakan Bimbingan Teknis Indeks Kami	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
10.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data	Sudah memanfaatkan teknologi informasi dan pengumpulan data	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.	Melakukan peningkatan pemahaman dan arahan kepada seluruh pegawai terhadap hasil	Sudah dilakukan pembinaan oleh kepala Diskominfo untuk membahasa apa saja	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Perencanaan,



	pengukuran kinerja agar memiliki rasa tanggung jawab atas laporan kinerja Dinas.	yang menjadi factor penghambat dalam merealisasikan kinerja yang ditentukan	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.	Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan ataupun peningkatan akuntabilitas, peningkatan efektifitas, efisiensi kinerja dan peningkatan kinerja	Sudah diadakan evaluasi setiap tribulan untuk menghimbau agar pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAK yang sudah di tentukan	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik tahun 2024 sebagai penjabaran Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya

3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024

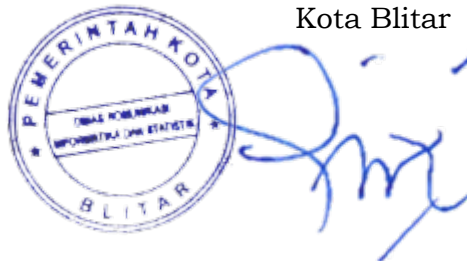
5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai bagian dan proses pelaksanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan tepat sasaran , tepat waktu , tepat anggaran dan administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya . Misi ke-5 Wali Kota Blitar Terpilih periode 2021-2026 yang diemban oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berbasis Teknologi Informasi ”.

Misi ke-5 Wali Kota Blitar dijabarkan menjadi tujuan/sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas adalah “Meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” Dan tujuan akhirnya untuk mewujudkan Kota Blitar sesuai dengan visi “ **Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT** “

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik
Kota Blitar



MUJIANTO.,S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710214 199201 1003